

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kinerja mengacu pada seberapa baik suatu kegiatan dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi. Meningkatkan kesejahteraan dan kekayaan pemilik atau pemegang saham perusahaan merupakan tujuan utama ketika memulai bisnis (Stam, Arzlanian, dan Elfring, 2013). Jika bisnis dapat berjalan dengan menghasilkan keuntungan yang diinginkan, nilai perusahaan dapat meningkat. Korporasi akan dapat mempertahankan operasi komersial, meningkatkan pertumbuhan perusahaan, dan membayar dividen kepada pemegang saham berkat laba yang dihasilkan (Sebahattin, Ba, dan Ta, 2014).

Kinerja sangat penting untuk bisnis dan mewakili manfaat yang jelas bagi organisasi (Huhtala, 2014; Sebahattin et al., 2014). Dalam 30 tahun terakhir, ide ini telah tumbuh dan menjadi salah satu topik utama yang dibahas dan dipahami dalam manajemen sumber daya manusia (selanjutnya disebut SDM). Kinerja adalah strategi manajemen yang dibuat untuk menghubungkan tujuan perusahaan dengan tujuan pribadi sehingga dapat hidup berdampingan secara harmonis (Shehu 2014; Martinez-shimarro, Devece, dan Llopis-albert, 2015). Bisnis dapat meningkatkan kinerjanya dengan bantuan kinerja bisnis untuk menjamin pencapaian tujuan mereka (Mahmoud, Blankson, Owusu-frimpong, dan Nwankwo, 2016).

Masalah kinerja masih menjadi hal yang diteliti hingga saat ini (Chen, 2019; Pawirosumarto & Sarjana, 2016; Rosmi & Syamsir, 2020). Penelitian mengenai kinerja ini sendiri telah dilaksanakan di berbagai sektor, baik pada sektor swasta (Abugre, 2019; Haroon, 2018; Kashif, 2017) maupun sektor publik (Cheong & Kim, 2017; Tran et al., 2020). Hasil penelitian mengenai kinerja pada sektor swasta selama 4 tahun terakhir menunjukkan pola yang berbeda.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Abugre (2019) menunjukkan bahwa kinerja dari sektor swasta menunjukkan hasil yang rendah. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Siam, Qaralleh, Mahmoud, Saad, & Lawgaly (2017), V. Priyadarshini & Dr. S. Gomathi (2018), Dhamostraran, Selvam, Sigo, & Ramasamy (2020) yang juga menunjukkan bahwa kinerja pada sektor swasta dipandang rendah, namun penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda dimana sektor swasta memiliki kinerja yang baik. Demikian halnya dengan penelitian kinerja pada sektor publik, terdapat pola yang berbeda dari hasil penelitian selama 4 tahun terakhir. Bussin

(2017) mengungkapkan bahwa kinerja sektor publik berada pada taraf rendah. Temuan tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Terason (2018), Ali, Ahababi, Singh, & Balasubramanian (2019), Olufemi, Afegbua, & Etim (2020) yang menyatakan bahwa kinerja sektor publik masih dipandang rendah. Namun, tingkat kinerja yang berbeda ditemukan dari sektor publik dimana penelitian dari Parrado, Reynaers, & Ram (2020) menyatakan bahwa sektor publik memiliki kinerja yang cukup tinggi.

Penelitian dari Lyngdoh (2018) membandingkan antara kinerja dari sektor swasta dan sektor publik, dimana didapatkan hasil bahwa tingkat kinerja di sektor publik lebih rendah dibanding sektor swasta. Kondisi ini memberi gambaran bahwa penelitian mengenai kinerja di sektor publik memiliki urgensi tinggi sebagai bentuk solusi dalam meningkatkan kinerja pada sektor ini. Di Indonesia telah dilakukan beberapa penelitian yang terkait dengan rendahnya tingkat kinerja pada organisasi sektor publik (Indrawati, 2017; Tambariki et al., 2018). Hasil menunjukkan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia masih berkinerja rendah terutama pada lembaga pemerintahan (Anshari, H., Masjaya, H., & Amin, 2014; Rohman, 2009; Tambariki et al., 2018). Pemerintah daerah, secara spesifik menjadi lembaga yang mendapat sorotan dalam berbagai penelitian yang membahas permasalahan kinerja lembaga pemerintahan (Auditya & Lismawati, 2013; Rohman, 2009; Sari & Mustanda, 2019). Salah satu organisasi pemerintahan yang kinerjanya kurang baik adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga publik berhasil menjalankan tanggung jawab pelayanan publiknya, diperlukan pengukuran kinerja sektor publik (Putri, Azwar, Ermawati, 2020). Istilah kinerja pemerintahan digunakan dalam sektor publik untuk menggambarkan hasil kerjanya, dengan elemen non-finansial yang secara umum memiliki bobot lebih besar (Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2017). *Local Government Performance* (Kinerja Pemerintah Daerah) menjadi istilah spesifik yang digunakan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Temuan pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dapat digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja pemerintah daerah (Triyuliyanto, 2018). Tabel 1.1 berikut menyajikan informasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Evaluasi AKIP) Jawa Barat dari tahun 2015 hingga 2019:

**Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2015 s/d 2019**

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
			NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT
1	KABUPATEN MAJALENGA	100	50.21	CC	51.36	CC	52.92	CC	60.83	B	67	B
2	KABUPATEN KUNINGAN	100	42.06	C	50.54	CC	60.82	B	65.02	B	66	B
3	KABUPATEN SUMEDANG	100	46.52	C	48.49	CC	40.82	C	60.98	B	67.26	B
4	KABUPATEN PURWAKARTA	100	48.92	C	50.02	CC	57.82	CC	62.13	B	64.93	B
5	KABUPATEN SUKABUMI	100	53.37	CC	56.30	CC	60.28	B	62.19	B	65	B
6	KABUPATEN TASIKMALAYA	100	Masih menggunakan data lama. Akan review ulang oleh KementanPANRB.						60.2	B	61.41	B
7	KABUPATEN GARUT	100			53.42	CC	67.16	B	70.39	BB	70.8	BB
8	KABUPATEN BOGOR	100			57.25	CC	63.95	B	65.14	B	66.17	B
9	KABUPATEN CIREBON	100	58.30	CC	58.88	CC	63.73	B	65	B	66	B
10	KABUPATEN INDRAMAYU	100	56.14	CC	57.81	CC	62.94	B	65.03	B	65	B
11	KABUPATEN BANDUNG	100	50.35	CC	54.81	CC	63.03	B	70.15	BB	70.26	BB
12	KABUPATEN BEKASI	100	52.11	CC	50.29	CC	61.79	B	62.74	B	62.74	B
13	KABUPATEN CIMAHI	100	53.86	CC	54.49	CC	62.23	B	65.39	B	66.26	B
14	KABUPATEN BANDUNG BARAT	100	43.02	C	57.31	CC	64.88	B	65.72	B	66	B
15	KABUPATEN CIANJUR	100	57.37	CC	58.85	CC	60.99	B	62.57	B	63.59	B
16	KABUPATEN PANGANDARAN	100			30.33	C	48.9	C	60.82	B	65.9	B
17	KABUPATEN KARAWANG	100	47.81	C	48.18	C	54.74	CC	60.88	B	63	B
18	KABUPATEN SUBANG	100	50.16	CC	51.08	CC	60.16	B	62.24	B	66.7	B
19	KOTA TASIKMALAYA	100	48.7	CC	51.34	CC	62.85	B	70.21	BB	71.09	BB
20	KOTA CIREBON	100			53.57	CC	62.05	B	65.48	B	67	B
21	KOTA BANJAR	100			56.94	CC	60.11	B	63.08	B	67	B
22	KOTA SUKABUMI	100	71.80	BB	74.05	BB	74.49	BB	74.83	BB	76.07	BB
23	KOTA DEPOK	100	56.13	CC	58.08	CC	63.14	B	65.47	B	67.02	B
24	KOTA BOGOR	100	56.04	CC	57.89	CC	62.44	B	67.43	B	71.05	BB
25	KOTA BEKASI	100	54.95	CC	55.11	CC	62.49	B	63.49	B	66.28	B
26	KOTA CIMAHI	100	48.12	C	50.27	CC	60.69	B	63.99	B	66	B
27	KOTA BANDUNG	100	60.2	A	60.61	A	60.37	A	60.05	A	78	BB
28	PROVINSI JAWA BARAT	100	70.06	BB	60.07	A	61.69	A	60.3	A	60.49	A

Sumber: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP) yang dinilai oleh Kementerian PANRB (2020)

Hasil Evaluasi AKIP Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2019 untuk Akuntabilitas Kinerja menunjukkan tidak satupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat A (skor 80-90), apalagi predikat AA (skor 90-100), dari 27 Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabar, 6 Pemerintah Kabupaten/Kota hanya memperoleh predikat BB (nilai 70-80), sedangkan sisanya 21 Pemerintah Kabupaten/Kota hanya bisa meraih predikat B (nilai 60-70). Hal ini menunjukkan masih rendahnya kinerja Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Menurut Tabel 1.2 di bawah ini, evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Evaluasi KPPD) memberikan data kinerja sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Peringkat dan Status Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun LPPD 2013, 2014, 2015, 2016, DAN 2017 sesuai KEPMEN dan LPPD 2018 sesuai EPPD Tahun 2019**

No	Nama Pemerintah Daerah	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Skor	Status	Skor	Status	Skor	Status	Skor	Status	Skor	Status	Skor	Status
1	KABUPATEN KUNINGAN	1.7979	S	3.0981	ST	3.4301	ST	3.4975	ST	3.3807	ST	3.4394	ST
2	KABUPATEN GARUT	3.0843	ST	3.1767	ST	3.3335	ST	3.4915	ST	3.2750	ST	3.5117	ST
3	KABUPATEN MAJALENGA	2.8356	T	3.1105	ST	3.3508	ST	3.4282	ST	3.1537	ST	3.4045	ST
4	KABUPATEN SUBANG	2.9818	T	3.2099	ST			3.4220	ST	2.6967	T	3.3859	ST
5	KABUPATEN TASIKMALAYA	1.9283	S	3.0847	ST	3.3411	ST	3.4185	ST	3.2332	ST	3.3149	ST
6	KABUPATEN BEKASI	2.9759	T	3.1379	ST	3.2832	ST	3.3898	ST	2.6632	T	3.3733	ST
7	KABUPATEN BANDUNG BARAT	2.7734	T	3.2274	ST	3.2589	ST	3.3684	ST	2.7562	T	3.3178	ST
8	KABUPATEN INDRAMAYU	2.6530	T	2.9421	T	3.2066	ST	3.3660	ST	3.1636	ST	3.4669	ST
9	KABUPATEN KARAWANG	2.7297	T	3.0042	ST	3.2433	ST	3.3547	ST	3.1559	ST	3.2977	ST
10	KABUPATEN SUMEDANG	1.4839	S	2.9783	T			3.3510	ST	3.1292	ST	3.2485	ST
11	KABUPATEN BOGOR	2.8833	T	3.1634	ST	3.3287	ST	3.3397	ST	3.1174	ST	3.2551	ST
12	KABUPATEN SUKABUMI	3.0156	ST	3.1025	ST	3.2260	ST	3.3230	ST	3.2634	ST	3.5157	ST
13	KABUPATEN CIAMIS	2.9276	T	3.2177	ST	3.3164	ST	3.3212	ST	3.0165	ST	3.3366	T
14	KABUPATEN CIREBON	2.9835	T	3.1275	ST	3.1749	ST	3.2945	ST	2.6287	T	3.2618	ST
15	KABUPATEN BANDUNG	2.8770	T	3.1679	ST	3.2492	ST	3.2708	ST	2.9536	T	3.3421	T
16	KABUPATEN CIANJUR	2.8461	T	3.1711	ST	3.3274	ST	3.2221	ST	2.5821	T	3.2270	ST
17	KABUPATEN PURWAKARTA	2.4333	T	2.8731	T	3.0943	ST	3.1706	ST	3.2097	ST	3.3673	ST
18	KOTA BANDUNG	3.0606	ST	2.9919	T	3.3040	ST	3.4110	ST	3.3019	ST	3.4013	ST
19	KOTA SUKABUMI	3.0366	ST	2.9968	T	3.2593	ST	3.3879	ST	3.2637	ST	3.3809	ST
20	KOTA CIMAHI	3.1095	ST	3.0759	ST			3.3590	ST	3.3274	ST	3.4699	ST
21	KOTA TASIKMALAYA	2.8421	T	2.7267	T	3.1186	ST	3.2901	ST	3.2622	ST	3.3703	ST
22	KOTA BOGOR	2.6329	T	3.0567	ST	3.1954	ST	3.2860	ST	3.1727	ST	3.3966	ST
23	KOTA BANJAR	2.9535	T	3.0679	ST	3.2809	ST	3.2782	ST	3.3032	ST	3.4535	ST
24	KOTA DEPOK	3.0926	ST	3.0902	ST	3.2908	ST	3.2670	ST	3.2858	ST	3.4140	ST
25	KOTA CIREBON	3.0147	ST	3.0085	ST	3.1031	ST	3.2383	ST	3.1177	ST	3.2964	ST
26	KOTA BEKASI	2.9434	T	2.9108	T	3.1447	ST	3.2154	ST	3.2546	ST	3.3686	ST
27	KABUPATEN PANGANDARAN											3.3578	ST

Sumber: Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Evaluasi KPPD) yg dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri (2020)

Berdasarkan hasil EKPPD 25 Pemda mendapatkan status ST (Sangat Tinggi) dan 2 Pemda hanya mendapatkan status T (Tinggi), yaitu Pemda Kabupaten Bandung dan Kabupaten Ciamis, walaupun penilaian sudah menduduki hasil yang cukup baik tapi kinerja tersebut belum optimal. Pandemi Corona Virus Diseases (Covid-19) 2019 menjadi faktor penyebab kinerja pemerintah daerah di bawah standar sejak Februari 2020. Perubahan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 berdampak signifikan, terutama dari sisi penerimaan. Pendapatan negara dan daerah menurun, terutama dari sektor pajak baik pajak pusat maupun daerah serta retribusi daerah. Akibat penurunan pendapatan negara dan daerah, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia harus melakukan berbagai perubahan dan mengkonsentrasikan anggaran belanja masing-masing dari belanja program/kegiatan ke belanja mitigasi dan pengelolaan dampak pandemi COVID-19. Tabel 1.3, Tabel 1.4, dan Gambar 1.2 berikut menunjukkan perbandingan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 Sebelum dan Setelah Perubahan:

**Tabel 1.3 Perbandingan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 Sebelum dan Sesudah Perubahan**

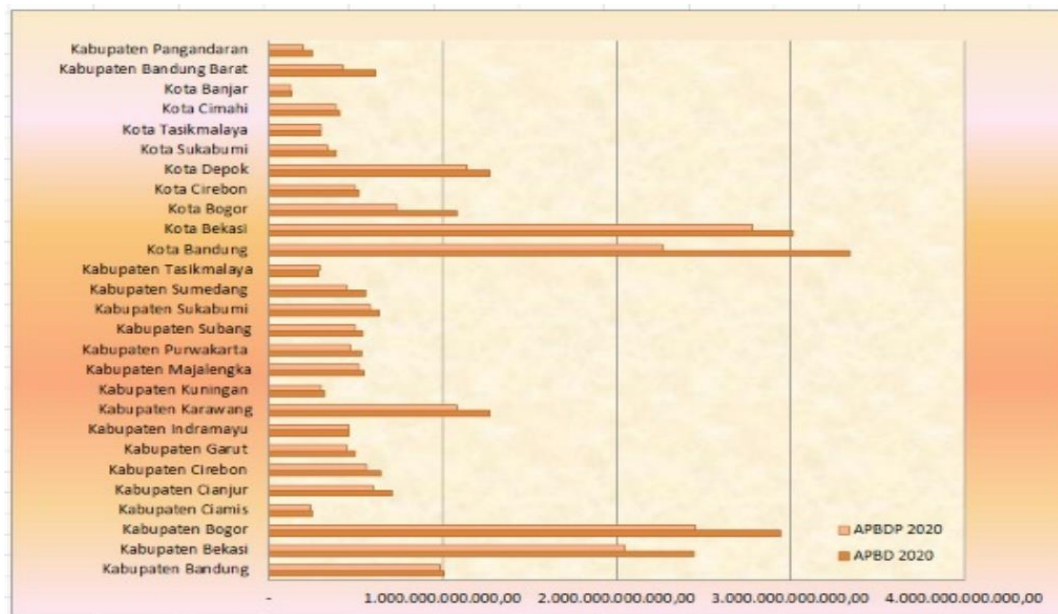
No.	Pemda Provinsi/Kab/Kota	APBD 2020			APBD Perubahan 2020		
		Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit
1	Provinsi Jawa Barat	41.583.152.865.173,00	45.995.261.227.603,00	- 4.412.108.362.430	38.206.464.722.794,00	43.255.142.408.503,00	- 5.048.677.685.709,00
2	Kabupaten Bandung	4.418.054.901.376,40	5.002.746.783.077,13	- 584.691.881.700,73			-
3	Kabupaten Bekasi	5.825.840.179.830,00	6.470.196.655.131,00	- 644.356.475.301,00			-
4	Kabupaten Bogor	6.776.024.836.000,00	7.692.424.836.000,00	- 916.400.000.000,00	7.509.724.822.000,00	8.615.020.621.000,00	- 1.105.295.799.000,00
5	Kabupaten Ciamis	2.454.873.539.186,00	2.488.071.039.186,00	- 33.197.500.000,00	2.639.369.227.060,00	2.761.980.537.108,00	- 122.611.310.048,00
6	Kabupaten Cianjur	3.666.381.720.820,20	3.697.287.720.820,20	- 30.906.000.000,00	3.859.342.333.573,00	4.113.726.045.031,00	- 254.383.711.458,00
7	Kabupaten Cirebon	3.579.590.687.796,00	3.626.276.619.828,00	- 46.685.932.032,00	3.857.038.117.772,00	4.144.872.556.128,00	- 287.834.438.356,00
8	Kabupaten Garut	4.520.752.813.530,00	4.593.303.908.247,00	- 72.551.094.717,00	4.592.298.518.286,00	4.906.820.922.510,00	- 314.522.404.224,00
9	Kabupaten Indramayu	3.449.952.966.000,00	3.428.193.058.000,00	21.759.908.000,00	3.372.074.387.200,00	3.514.153.055.175,00	- 142.078.667.975,00
10	Kabupaten Karawang	4.549.747.799.016,00	4.602.810.420.991,00	- 53.062.621.975,00	4.277.856.159.371,00	4.418.337.131.291,00	- 140.480.971.920,00
11	Kabupaten Kuningan	2.656.253.030.366,00	2.653.263.030.366,00	2.990.000.000,00			-
12	Kabupaten Majalengka	3.617.076.218.079,83	3.666.346.740.188,62	- 49.270.522.108,79	3.306.623.122.004,83	3.405.314.336.061,58	- 98.691.214.056,75
13	Kabupaten Purwakarta	2.322.179.013.252,00	2.378.696.013.252,00	- 56.517.000.000,00	2.280.710.330.290,00	2.314.420.694.662,00	- 33.710.364.372,00
14	Kabupaten Subang	3.006.749.960.234,00	3.405.956.467.826,00	- 399.206.507.592,00			-
15	Kabupaten Sukabumi	4.052.381.803.057,00	4.152.324.743.057,00	- 99.942.940.000,00	3.870.302.511.936,00	4.058.440.789.024,00	- 188.138.277.088,00
16	Kabupaten Sumedang	2.821.541.241.474,07	2.807.054.241.474,07	14.487.000.000,00	2.806.868.856.166,22	2.908.219.300.667,39	- 101.350.444.501,17
17	Kabupaten Tasikmalaya	3.219.128.443.788,00	3.239.328.443.788,00	- 20.200.000.000,00	3.721.093.102.341,67	3.926.203.604.059,85	- 205.110.501.718,18
18	Kota Bandung	7.117.204.956.964,00	7.698.341.521.707,08	- 581.136.564.743,08	6.039.502.129.310	6.270.781.053.453,25	- 231.278.924.143,00
19	Kota Bekasi	5.826.941.089.195,00	5.801.941.089.195,00	25.000.000.000,00			-
20	Kota Bogor	2.434.344.617.189,00	2.604.493.955.763,00	- 170.149.338.574,00	2.354.016.653.140,00	2.633.220.414.393,19	- 279.203.761.253,19
21	Kota Cirebon	1.770.976.050.000,00	1.812.628.021.740,00	- 41.651.971.740,00	1.690.836.799.865,00	1.689.345.566.970,00	1.491.232.895,00
22	Kota Depok	3.083.042.116.963,00	3.624.689.323.997,00	- 541.647.207.034,00	3.074.802.282.633,00	3.671.363.699.697,00	- 596.561.417.064,00
23	Kota Sukabumi	1.304.292.628.054,00	1.342.538.648.054,00	- 38.246.020.000,00	1.210.380.343.459,00	1.298.678.527.231,00	- 88.298.183.772,00
24	Kota Tasikmalaya	1.671.546.636.997,00	1.701.830.059.377,00	- 30.283.422.380,00	1.759.631.515.121,06	1.790.871.070.529,29	- 31.239.555.408,23
25	Kota Cimahi	1.460.263.737.005,57	1.541.975.799.738,02	- 81.712.062.732,45			-
26	Kota Banjar	813.004.804.832,00	833.062.975.112,20	- 20.058.170.280,20	773.435.816.598,00	800.569.938.016,00	- 27.134.121.418,00
27	Kabupaten Bandung Barat	2.823.982.116.044,00	3.279.952.683.577,00	- 455.970.567.533,00	2.805.961.487.188,00	3.325.373.630.695,25	- 519.412.143.507,25

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat (BPKAD), 2020

**Tabel 1.4 Perbandingan Target PAD dalam APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Sebelum dan Sesudah Perubahan**

NO	PEMDA KAB/KOTA	APBD 2020	APBDP 2020	SELISIH
1	Kabupaten Bandung	1.006.599.910.336,40	986.568.768.214,00	-20.031.142.122
2	Kabupaten Bekasi	2.446.413.378.869,00	2.040.404.986.777,00	-406.008.392.092
3	Kabupaten Bogor	2.940.861.502.000,00	2.453.145.000.000,00	-487.716.502.000
4	Kabupaten Ciamis	252.715.071.200,00	240.807.023.137,00	-11.908.048.063
5	Kabupaten Cianjur	709.817.067.542,20	600.569.212.397,00	-109.247.855.145
6	Kabupaten Cirebon	644.500.670.876,00	565.008.144.276,00	-79.492.526.600
7	Kabupaten Garut	501.064.934.915,00	444.685.029.785,00	-56.379.905.130
8	Kabupaten Indramayu	463.390.799.000,00	459.921.867.000,00	-3.468.932.000
9	Kabupaten Karawang	1.273.814.055.313,00	1.077.673.997.195,00	-196.140.058.118
10	Kabupaten Kuningan	323.447.628.282,00	303.047.786.880,00	-20.399.841.402
11	Kabupaten Majalengka	549.201.999.991,83	516.617.719.416,83	-32.584.280.575
12	Kabupaten Purwakarta	537.244.347.643,00	469.549.138.158,00	-67.695.209.485
13	Kabupaten Subang	544.773.087.024,00	498.687.954.689,00	-46.085.132.335
14	Kabupaten Sukabumi	636.807.440.899,00	583.974.250.325,00	-52.833.190.574
15	Kabupaten Sumedang	553.370.846.241,07	449.530.481.156,22	-103.840.365.085
16	Kabupaten Tasikmalaya	282.680.528.383,00	292.933.685.532,67	10.253.157.150
17	Kota Bandung	3.339.363.515.736,00	2.264.814.094.039,25	-1.074.549.421.697
18	Kota Bekasi	3.017.100.020.330,00	2.780.100.880.230,00	-236.999.140.100
19	Kota Bogor	1.083.412.298.220,00	741.531.123.201,00	-341.881.175.019
20	Kota Cirebon	520.061.006.000,00	497.946.224.831,00	-22.114.781.169
21	Kota Depok	1.269.422.760.810,00	1.140.891.422.838,00	-128.531.337.972
22	Kota Sukabumi	389.267.787.772,00	338.165.897.404,00	-51.101.890.368
23	Kota Tasikmalaya	298.507.826.168,00	298.366.800.979,06	-141.025.189
24	Kota Cimahi	413.275.043.058,57	389.368.043.854,57	-23.906.999.204
25	Kota Banjar	135.602.422.990,00	124.880.110.565,00	-10.722.312.425
26	Kabupaten Bandung Barat	614.280.915.227,00	424.427.563.825,00	-189.853.351.402
27	Kabupaten Pangandaran	249.704.900.140,00	198.683.900.140,00	-51.021.000.000

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Provinsi Jawa Barat, 2020



**Gambar 1. 1 Perbandingan Target PAD yang Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dalam APBD Murni dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat (BPKAD), 2020

Dari sisi penerimaan APBD, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), hampir seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat telah menetapkan sasaran PAD dalam APBD Perubahan 2020 yang lebih rendah dari target PAD dalam APBD Murni 2020. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya target dan realisasi PAD ini. PAD terdiri dari pajak dan retribusi daerah, PAD legal lainnya, dan hasil dari berbagai pengelolaan kekayaan daerah.

Dalam situasi pandemi seperti yang kita alami saat ini, sangat penting untuk memperhatikan bagaimana kinerja pemerintah daerah. Pemerintah daerah bekerja sangat keras untuk meningkatkan kinerja mereka sebagai akibat dari wabah Covid-19. Derajat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah yang menyertainya akan secara langsung dipengaruhi oleh tinggi dan buruknya kinerja pemerintah daerah (Hamid & Sekuritas, 2018; Pradiatmi, 2015). Sejauhmana otoritas lokal ini bergantung pada pemerintah pusat juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh kinerjanya yang tinggi dan buruk (Puspitasari, 2017).

Pendekatan *Strategic Management Theory* dengan *Dynamic Capability View* (DCV) digunakan dalam menyelesaikan masalah rendahnya kinerja pemerintahan daerah. Untuk memodifikasi kapasitas organisasi dalam menghadapi situasi dinamis, DCV adalah kemampuan untuk mengintegrasikan, membangun, dan merestrukturisasi sumber daya organisasi agar tetap kuat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat (Chowdhury & Quaddus, 2018; Eisenhardt, K.M., Martin, J.A., 2000; Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, 1997). Implementasi DCV sangat relevan dengan keadaan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemampuan dinamisnya untuk membantu pemerintah daerah dalam menerapkan strategi baru untuk mencerminkan kondisi lingkungan yang berubah. Pemerintah daerah dihadapkan pada perubahan lingkungan yang drastis dan dinamis selama masa pandemi. Perubahan terjadi ketika sumber daya yang dapat diakses digabungkan dan dimodifikasi dengan cara yang baru dan berbeda (Wang & Gon, 2017).

Ketepatan penggunaan strategi dalam menjalankan suatu organisasi akan menentukan pencapaian tingkat kinerja organisasi tersebut. Demikian halnya dengan pemerintah daerah, untuk mencapai kinerja yang diinginkan tentunya pemda harus memiliki strategi yang tepat. Perubahan lingkungan yang drastis akibat pandemi mendorong pemda untuk melakukan perubahan atau inovasi. Efektivitas pemerintah kota telah menjadi subyek dari banyak penelitian sebelumnya. Meskipun demikian, ada banyak variabel yang mungkin berdampak. Menurut temuan studi konseptual oleh Putri, Azwar, dan Ermawati (2020), keahlian teknis,

dedikasi manajerial, dan sumber daya semuanya berdampak pada seberapa baik kinerja pemerintah daerah.

Pengetahuan teknis memiliki dampak positif yang cukup besar terhadap kinerja, menurut penelitian Yang dan Hsieh (2007), Akbar, Pilcher & Perrin (2012), dan Putri, Azwar dan Ermawati. Pengabdian manajemen mungkin juga berdampak pada kinerja. Menurut penelitian Cavalluzzo dan Ittner (2004), Akbar, Pilcher & Perrin (2012), Tzempelikos (2015), Aswar & Saidin (2018), dan lainnya, terdapat korelasi yang kuat antara komitmen manajemen dan kinerja.

Sumber daya adalah elemen berikutnya yang mungkin berdampak pada kinerja. Sumber daya secara signifikan meningkatkan kinerja, menurut studi oleh Julnes dan Holzer (2001), Wang dan Berman (2000), Laurensius dan Halim (2005), dan Akbar, Pilcher, dan Perrin (2012). Menurut Abu-Shanab (2020), *e-government* merupakan aspek lanjutan yang dianggap mampu meningkatkan kinerja, khususnya kinerja pemerintahan. Studi sebelumnya oleh Kurniasih, Fidowaty, dan Sukaesih (2013), yang menemukan bahwa *e-government* secara signifikan meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dirujuk dalam penelitian Abu Shanab (2020).

Lembaga Audit Tertinggi/SAI, lembaga audit eksternal tertinggi pemerintah, harus terlibat aktif dalam menggalakkan *e-government* sebagai alat yang dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah untuk layanan publik yang lebih transparan dan lebih baik, menurut Departemen Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Laporan Dinas Sosial (DESA) pada Seminar PBB-INTOSAI tentang Audit Pemerintah ke-18.

Pada pertemuan ke-11 (sebelas) di New Delhi pada November 2017, *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sebuah organisasi non-pemerintah yang membawahi lembaga-lembaga audit eksternal pemerintah di seluruh dunia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sependapat bahwa *e-government* menciptakan risiko dan tantangan baru bagi auditor dan pemerintah, yang dipandang kaku, serta keduanya. Berdasarkan paparan tersebut dapat dikatakan bahwa *e-government* merupakan faktor kuat yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah, dalam hal ini adalah kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi alasan dipilihnya *e-government* sebagai solusi dari masalah kinerja pemerintahan oleh penulis.

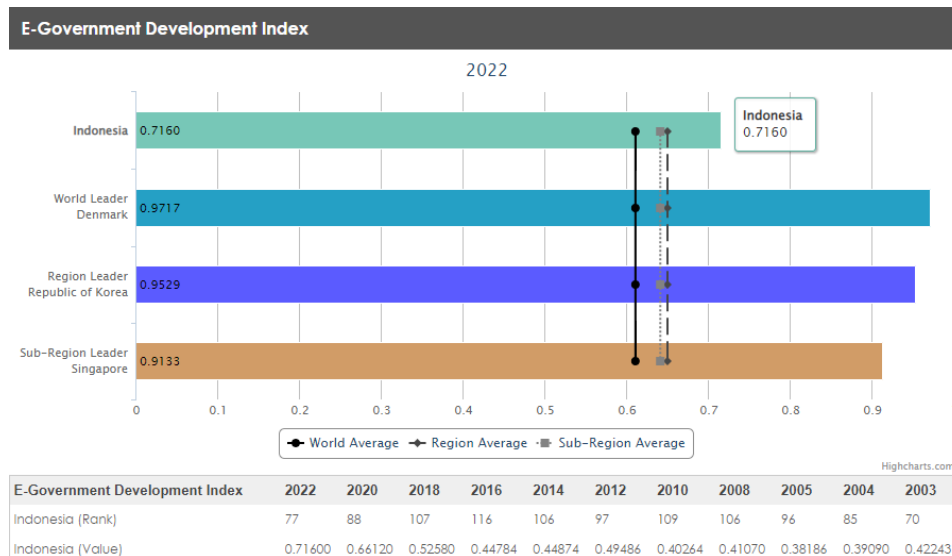
Pentingnya keberadaan *e-government* dalam pemerintah telah banyak dibahas dalam banyak literatur dan penelitian (Wasef et al., 2022) mengungkapkan bahwa pada dasarnya



sektor publik yang mendapat manfaat dari dana publik perlu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, dimana masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien, pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, dan memastikan bahwa sistem pemerintahan dikelola dengan cara yang efektif. Tuntutan penggunaan *e-government* semakin meningkat khususnya pada saat pandemi, hal ini karena masyarakat semakin sadar pentingnya *e-government* saat diberlakukan pembatasan-pembatasan secara fisik karena pandemi. Penelitian yang dilakukan oleh Suparyanto dan Rosad (2015, 2020) menyajikan bukti empirik bahwa penggunaan sistem teknologi digital pada sistem pemerintahan telah terbukti meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, melalui proses percepatan kerja pada sektor pemerintahan, upaya menghubungkan masyarakat agar bisa berinteraksi dengan dunia luar, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Penelitian-penelitian tersebut telah menyinggung mengenai pentingnya penggunaan *e-government* dalam pemerintahan, namun sampai saat ini, belum banyak penelitian sebelumnya yang secara empiris mengkaji *e-government* yang mempengaruhi kinerja pemerintahan, khususnya di Indonesia. Berbagai penelitian yang sering ditemui di Indonesia mengenai *e-government* terbatas mengenai kualitas *websites* yang digunakan pada sistem *e-government* di Indonesia (Wahid, 2008), tantangan penerapan sistem *e-government* (Endang, 2018), penerapan *e-government* dalam revolusi 4.0 (Wirawan, 2020), penggunaan sistem *e-government* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Kurniati et al., 2021). Terlepas dari kenyataan bahwa ada beberapa manfaat potensial dari *e-government* bagi warga, organisasi sektor publik, dan pemasok teknologi dan layanan *e-government*, studi oleh Chircu (2014) menunjukkan bahwa saat ini tidak ada kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi inisiatif *e-government*.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) setiap dua tahun sekali sejak tahun 2003 melakukan survey indeks pengembangan *e-government* semua negara di dunia dan sampai dengan tahun 2022 posisi Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2. berikut.

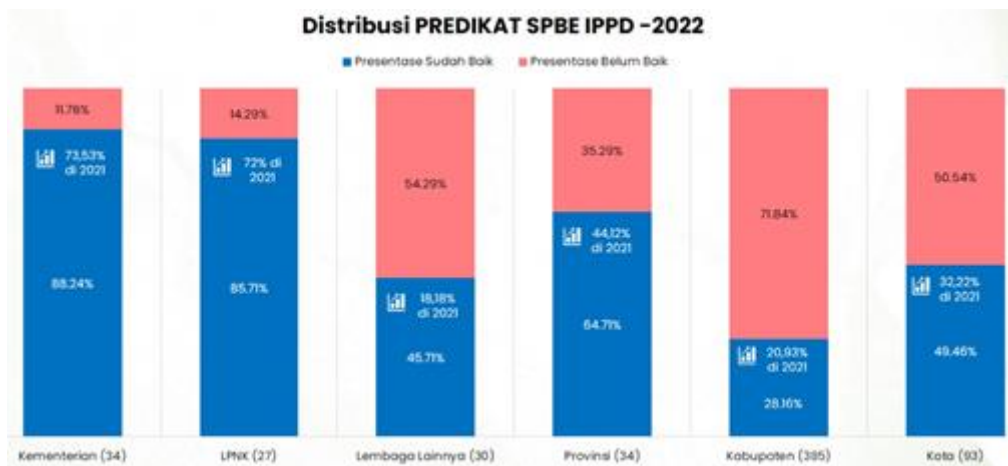


**Gambar 1.2 E-Government Development Index**

Sumber: United Nation E-Government Survey, 2022

Berdasarkan Gambar 1.2 pada tahun 2022 Indonesia menempati peringkat 77 dunia dan peringkat 5 di Asia Tenggara, dimana Singapura menempati peringkat 1, disusul oleh Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam. Dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya Indonesia naik 11 peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 (Kemenpan RB, 2022). Dari hasil survei tersebut maka disimpulkan bahwa kinerja *e-government* Indonesia masih rendah, sehingga masih perlu kerja keras dari seluruh instansi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah untuk meningkatkannya dalam rangka mewujudkan pemerintahan berkelas dunia atau *world class government*.

Upaya untuk mendorong implementasi dan pengembangan *e-government* setiap instansi pemerintahan di Indonesia, baik kementerian, lembaga non kementerian, lembaga lainnya, dan pemerintah daerah telah diatur dengan Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan setiap instansi pemerintahan dalam mengimplementasikan dan mengembangkan SPBE, setiap tahunnya Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi SPBE. Distribusi predikat hasil evaluasi SPBE instansi pemerintahan tahun 2022 ditunjukkan pada Gambar 1.3 berikut.



**Gambar 1.3 Distribusi Predikat SPBE Instansi Pemerintah**

Sumber : KemenpanRB, 2022

Berdasarkan Gambar 1.3 ternyata untuk instansi pusat (kementerian) menunjukkan predikat baik sebanyak 88,24% dan sisanya belum baik sebanyak 11,76%. Untuk LPNK mendapatkan predikat baik sebanyak 85,71% dan sisanya sebanyak 14,29% dinyatakan belum baik, sedangkan lembaga lainnya yang berpredikat baik sebanyak 45,71% dan yang dinyatakan belum baik sebanyak 54,29%. Untuk pemerintah daerah (provinsi) mendapatkan predikat baik sebanyak 64,71% dan sisanya sebanyak 35,29% masih belum baik, sedangkan pemerintah kabupaten hanya sebanyak 28,16% yang berpredikat baik dan sisanya sebanyak 71,84% masih dinyatakan belum baik, selanjutnya untuk pemerintah kota hanya 49,46% yang sudah berpredikat baik dan sisanya sebanyak 50,54% masih berpredikat belum baik (Kemenpan RB, 2022).

Keberhasilan implementasi dan pengembangan *e-government* sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Dalam era revolusi 4.0 peran *leadership* sangat memegang peranan penting untuk mewujudkan *e-government* atau pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik menjadi sebuah keharusan. Kapasitas kepemimpinan di setiap sektor, serta pemahaman terhadap perubahan yang berlangsung masih rendah. Akibatnya, di tingkat nasional dan global, tidak terbangun kerangka institusional untuk melakukan tata kelola difusi inovasi dan mitigasi terhadap proses disrupsi secara memadai (Klaus Schwab, 2016). Disisi lain, Mc. Kinsey (2016) mengeluarkan hasil penelitian, bahwa teknologi yang berkembang pada era revolusi industri 4.0 ini dapat membantu pemerintah daerah dan pusat untuk mengakselerasi pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal 4, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan tentang peran kepemimpinan dalam transformasi digital, yaitu: a) mencerdaskan kehidupan bangsa, b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, d) kesempatan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, dan e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Pemanfaatan teknologi informasi di berbagai bidang tentunya sangat membantu organisasi untuk memperoleh tujuan yang diharapkan. Seiring dengan perkembangannya revolusi industry 4.0 dan revolusi pemerintahan 4.0 menjadi mendasar dalam transformasi dalam pemerintahan dalam mengadopsi penggunaan teknologi. Diharapkan dengan adanya bantuan teknologi informasi akan mempermudah dan mempercepat dalam pemberian pelayanan. Revolusi industry 4.0 mendorong sistem otomatisasi di semua tahapan pelayanan publik melalui sistem informasi yang menggabungkan sumber daya, teknologi informasi, dan hubungan informasi (Rochmansjah & Karno, 2020). Reformasi tersebut menghasilkan keberhasilan pemasangan infrastruktur pemerintahan digital yang cukup maju. Sudah diterima secara universal bahwa teknologi digital meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi administrasi, membantu mengurangi pengeluaran, dan menghasilkan tata kelola yang lebih baik.

Terdapat kesepakatan bahwa tujuan akhir dari implementasi *e government* adalah untuk mencapai *good government governance* (GGG), sedangkan suksesnya *e-government* membutuhkan praktik *good governance* yang baik (Suhardi et al., 2015). Kemajuan dan pemajuan *e-government* sebenarnya ditentukan oleh prinsip-prinsip *good governance*, seperti penegakan hukum, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara, partisipasi publik, dan keadilan atau dapat diasumsikan sebagai faktor eksternal dan internal (Suhardi et al., 2015).

Penelitian yang dikeluarkan oleh (Mohammad Abdul Salam, 2013; Alaaraj & Ibrahim, 2014; Suhardi et al., 2015; Nurita, 2016; Majid, 2021; Syahputri & Kusdarini, 2021) menggambarkan bahwa *e-government* diyakini sebagai alat yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mewujudkan *good governance* atau tata kelola yang baik dalam pemerintahan seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keterbukaan, komitmen dan transparansi, namun temuan dari beberapa penelitian tersebut menghasilkan bahwa tidak semua praktik *e-government* memiliki pengaruh terhadap *good governance*, sehingga perlu diperhatikan dimensi-dimensi secara terpisah pengaruh langsungnya terhadap *good governance* seperti kinerja *e-service*, *e-administration* dan lainnya. Temuan lainnya juga mengemukakan bahwa

seringkali ditemui kinerja dari *e-government* dan *good governance* merupakan dua konsep terpisah yang tidak memiliki keterkaitan yang kuat.

Keterkaitan antara *e-government* dan *good governance* dengan kinerja pemerintah telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, (Majid, 2021) meneliti hubungan keterkaitan tersebut secara umum dan menghasilkan bahwa *e-government* memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja pemerintahan dan memiliki pengaruh tidak langsung karena harus dimediasi dengan *good governance*.

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini mengenai penerapan strategi *e-government* dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang mempengaruhi terciptanya *good governance* masih sedikit diungkapkan secara spesifik pada penelitian terdahulu, sehingga menjadi salah satu keterbaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. *Novelty* lain dalam penelitian ini adalah keterkaitan lingkungan eksternal dan lingkungan internal, strategi *e-government*, *good governance*, dan kinerja pemerintahan karena belum ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik membahas keterkaitan dalam konteks pemerintahan khususnya pemerintah daerah.

Sesuai uraian permasalahan yang telah dipaparkan, maka perlu dilakukan analisis mengenai “**Model Strategi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan**”. Faktor-faktor berikut yang akan digunakan perlu dipertimbangkan saat kita mempelajari lebih lanjut masalah ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan diidentifikasi, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kinerja pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang ditunjukkan oleh kuat lemahnya Lingkungan Eksternal, Lingkungan Internal, Strategi *E-Government* dan *Good Governance* yang mempengaruhinya?
2. Apakah terdapat pengaruh Lingkungan Eksternal terhadap Lingkungan Internal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal terhadap Strategi *E-Government* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
4. Apakah terdapat pengaruh Lingkungan Internal dan Strategi *E-Government* terhadap *Good Governance* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat?
5. Apakah terdapat pengaruh Strategi *E-Government* dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat?

Moch. Lukmanul Hakim, 2023

**MODEL STRATEGI E-GOVERNMENT**

**DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Gambaran kinerja pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat meliputi Lingkungan Eksternal, Lingkungan Internal, Strategi *E-Government* dan *Good Governance* yang mempengaruhinya.
2. Pengaruh Lingkungan Eksternal terhadap Lingkungan Internal Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
3. Pengaruh Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal terhadap Strategi *E-Government* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
4. Pengaruh Lingkungan Internal dan Strategi *E-Government* terhadap *Good Governance* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Pengaruh Strategi *E-Government* dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

1. KPK, dalam rangka upaya pencegahan korupsi pada semua pemerintah daerah, maka sejak tahun 2018 KPK melalui Tim Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan di bawah Deputi Bidang Pencegahan KPK intens melakukan asistensi dan supervisi untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan:
  - a. untuk mengevaluasi sejauhmana perkembangan kinerja pemerintahan yang dicapai oleh pemerintah daerah setelah penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaannya;
  - b. memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan melengkapi kekurangan-kekurangannya untuk diterapkan kembali di kemudian hari.
2. Sebagai satu-satunya auditor eksternal pemerintah, BPK memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menekankan pemerintah daerah yang menggunakan *e-government* untuk memberikan pelayanan publik sebagai metode pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara;
  - b. memberikan masukan bagi pembuatan petunjuk teknis (juknis) atau petunjuk pelaksanaan (juklak) pemeriksaan kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan

- c. untuk memastikan bahwa audit kinerja SPBE terhadap pemerintah daerah yang sudah, sedang dan akan menerapkan *e-government*, apakah sudah sesuai dengan kondisi empirik yang terjadi.
3. Pemerintah daerah yang telah menerapkan *e-government*, sedang, atau akan melakukannya meliputi:
  - a. berfungsi sebagai model dan referensi untuk evaluasi dalam rangka perbaikan dan pengembangan SPBE;
  - b. sebagai bahan pertimbangan ketika memutuskan bagaimana menerapkan *e-government*.
4. Universitas Pendidikan Indonesia, sebagai lembaga pendidikan:
  - a. menjadi nara sumber untuk mata kuliah audit sistem informasi pada umumnya atau di sektor publik pada khususnya;
  - b. berfungsi sebagai *template* untuk pengembangan penelitian *e-government* di masa depan;
5. Penulis harus meningkatkan dan memperluas pemahaman tentang strategi *e-government* beserta implementasinya terutama di pemerintah daerah tempat penulis bekerja.

## 1.5 Struktur Organisasi

Struktur penulisan proposal ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan beberapa hal termasuk latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan struktur organisasi di dalam penelitian.

### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan gagasan, konsep, dan temuan terkait dari penelitian sebelumnya. Secara keseluruhan, bab ini memberikan gambaran tentang pengertian teoritis, termasuk definisi, dimensi, dan model masing-masing variabel serta kerangka dan asumsi penelitian.

### BAB III: METODE PENELITIAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini menjabarkan teknik-teknik penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah ditentukan secara menyeluruh.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pokok bahasan dan tujuan penelitian, gambaran umum responden, analisis deskriptif masing-masing variabel yang diteliti, analisis verifikasi hubungan sebab akibat antar variabel, dan pembahasan yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari masing-masing variabel. hipotesis yang diajukan.

Moch. Lukmanul Hakim, 2023

**MODEL STRATEGI E-GOVERNMENT**

**DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Selain menawarkan rekomendasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan pembuat kebijakan sebagai implikasi manajerial, bab ini menawarkan kesimpulan tentang hubungan kausal antara variabel dari hipotesis yang diajukan. Ini juga menjelaskan lebih lanjut keterbatasan penelitian, yang seharusnya menjadi panduan bagi peneliti masa depan yang ingin melakukan perbaikan.

### DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi referensi yang terdiri dari sumber buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal bereputasi nasional dan internasional serta sumber-sumber lainnya baik *offline* maupun *online* yang relevan

### LAMPIRAN

Bagian ini menyajikan lampiran angket, hasil uji validitas dan reliabilitas, pengkodean hasil penelitian, hasil uji analisis deskriptif dan verifikatif, biodata singkat penulis, surat izin penelitian, surat keputusan tugas pembimbing penulisan disertasi, surat keterangan memenuhi syarat publikasi, dan surat keterangan memenuhi syarat batas maksimal kemiripan (*similarity index* turnitin kurang dari 25%), serta surat pernyataan perbaikan revidi disertasi.